



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRI ASNURI HERKUTANTO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 511422

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/45 m2 di KOTA SEMARANG ,
HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/45 m2 di SEMARANG, HASIL
SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 146.500.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
26.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
26.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 59.340.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 68.793.093

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.134.633.093

III. HUTANG Rp. 109.373.325

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.025.259.768

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.